



**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227  
Hayam Wuruk Plaza Lt.17, Jalan Hayam Wuruk No.108, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat 11160  
website: [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id) email: [info@komnasham.go.id](mailto:info@komnasham.go.id)

Nomor : 79/PR.02.00/0.3.2/I/2023  
Lampiran : -  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu Dokumen  
Hal : Penyampaian Data Persiapan Reviu Angka Dasar Komnas HAM  
dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2024

Jakarta, 30 Januari 2023

Yth.

**Direktur Jenderal Anggaran**  
**Kementerian Keuangan RI**  
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-31/AG/2023 tanggal 19 Januari 2023 hal Permintaan Data Persiapan Reviu Angka Dasar dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2024, bersama ini kami sampaikan data dan informasi terkait reviu angka dasar Satker Komnas HAM, sebagai berikut:

1. Rencana PNPB tahun 2024;
2. Data Anggaran Kontrak Tahun Jamak (MYC) TA 2022 - TA 2025;
3. Data dan Alokasi Anggaran untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2020;
4. Kegiatan Prioritas Nasional TA 2023 beserta alokasi anggarannya yang akan berlanjut pada TA 2024;
5. Data Jumlah Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 dan Rencana Tambahan Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2024;
6. Anggaran TA 2022 dan Kebutuhan Anggaran TA 2024 untuk Belanja Operasional dan Non Operasional Berkarakteristik Operasional; dan
7. Kegiatan TA 2024 yang dibiayai dengan sumber dana Non RM (RMP, PLN, HLN, PNBP, BLU, PHDN, dan SBSN).

Diinformasikan bahwa dalam lampiran data reviu angka dasar Satker Komnas HAM telah memuat juga data reviu angka dasar Komnas Perempuan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,



Aris Wahyudi

Tembusan:

1. Direktur Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN;
2. Direktur Hukum dan Regulasi;
3. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
4. Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Hukum.